**Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Harta Bersama
Pasca Perceraian
(Studi Putusan Perkara No. 1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr)**

Alli Hasyim

STIS Wahidiyah, allihasyim@uniwa.ac.id

Dra. Fauziah Isnaini, M. Pd.I.

STIS Wahidiyah, fauziahisnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Pada putusan perkara No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr merupakan perkara harta bersama setelah perceraian. Namun, dalam persidangannya tergugat mengajukan gugatan balasan atau disebut juga gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya yang masih terutang atau belum dibayar yakni untuk memberikan kompensasi finising rumah dan toko, nafkah anak dan biaya pengurusan sertifikat tanah. Namun dalam gugatan rekonvensi yang diajukan ini dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima karena perkara tersebut obsuur libel.

Kata Kunci: *Gugatan Rekonvensi, Harta Bersama, Perceraian*

Abstract

In case ruling No.1566 / Pdt.G / 2017 / PA.Kab.Kdr is a joint property case after divorce. However, in his trial the defendant filed a counter-lawsuit or also called a reconciliation lawsuit to claim his rights which were still owed or unpaid namely to provide compensation for finalizing the house and shop, the child's livelihood and the cost of obtaining a land certificate. However, in the reconvention lawsuit filed, it was stated by the judge that it could not be accepted because the case was obsuur libel.

Keywords: *Claims for Reconciliation, Joint Assets, Divorce*

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah swt., bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah swt., dalam al-quran dan as-sunnah yang bersifat global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah swt., dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Saebani, 2013, hal. 18-19).

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir (Rochaeti, 2013, hal. 651).

Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian pasti akan membawa permasalahan baru, dimana salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak istri pasti akan mengajukan gugatan tentang harta bersama dalam penyelesaian perceraian. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian, harta bersama sering

kali muncul pada saat telah terjadi perceraian atau bahkan pada saat perceraian sedang berlangsung atau diproses di Pengadilan Agama (Jamal, Tanpa Tahun). Sengketa harta bersama banyak diawali dengan permasalahan keluarga yang tidak mampu diselesaikan secara kekeluargaan. Banyak faktor yang menyebabkan penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan rasa keadilan. Diantaranya faktor pendapatan, faktor pembagian, faktor budaya, faktor agama dan banyak faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa harta perkawinan (Gunawan, 2017, hal. 82).

Pada pasal 37 Undang-undang Perkawinan menentukan, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian, bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat 1 KHI menjelaskan, "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama." Kemudian dalam pasal 97 ditentukan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". (Mesrain, 2012, hal. 60).

Menurut Mertokusumo dalam Desi Fitrianti (2017, hal. 96) menerangkan bahwa secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai

atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat di proses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Gugatan rekonsvansi merupakan gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya (Pasal 132a ayat 1 HIR). Pada dasarnya gugatan rekonsvansi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b HIR jo 158 RBg). Gugatan rekonsvansi merupakan syarat imperative harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Tidak diajukannya gugatan rekonsvansi bersama-sama dengan jawaban, mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Helmi, 2014, hal. 2-3).

Menurut M. Yahya Harahap dalam Helmi (2014, hal. 3) menjelaskan gugatan rekonsvansi bertujuan untuk mencapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Hal tersebut karena penggugat rekonsvansi tidak dikenakan biaya apabila ia mengajukan gugatan rekonsvansi, akan tetapi apabila penggugat rekonsvansi mengajukan perkara baru secara tersendiri maka dikenakan biaya. Berdasarkan data yang diperoleh yaitu berupa putusan perkara No.1566/ Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr., yang berisi bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan kemudian melakukan perceraian karena suatu sebab.

Dalam hal putusan perkara ini, istri sebagai tergugat melakukan gugatan rekonsvansi terhadap tergugat yaitu mantan suaminya. Bahwa putusan gugatan rekonsvansi tersebut tidak dapat diterima oleh hakim karena hakim berkesimpulan gugatan rekonsvansi penggugat tersebut cacat formil/obscuur libel, oleh karenanya gugatan rekonsvansi penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji kembali putusan hakim yang tidak menerima gugatan rekonsvansi yang dilakukan tergugat. Apakah putusan hakim tersebut sudah menciptakan rasa keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa

tidak dapat diterimanya gugatan rekonsvansi yang dilakukan tergugat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait yakni majelis hakim putusan perkara No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, buku-buku juga digunakan sebagai sumber data tambahan. Setelah data terkumpul, data diolah dengan tahapan mengedit, mengklasifikasi, dan mengelompokkan sesuai rumusan masalah. Kemudian dikaji ulang dan dianalisis dengan menghubungkan data dan kajian pustaka. Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang bersifat umum aturan hukum acara. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang tidak diterimanya surat gugatan rekonsvansi No.1566/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonsvansi Dalam Perkara Harta Bersama No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr terkait gugatan rekonsvansi dalam perkara harta bersama, yang mana dalam konvensi menyebutkan bahwa permohonan penggugat untuk memiliki harta asal sebidang tanah yang berada di Kabupaten Kediri dan harta bersama berupa benda bergerak yang masih dikuasai oleh tergugat yaitu 1 unit mobil Daihatsu (Xenia) tahun 2013, warna hitam metalik nomor polisi AG 615 YH, atas nama Sriharti ditaksir senilai Rp. 110.000.000,-, meja dan kursi 1 set, 1 meja makan dan 4 kursi, 1 lemari bupet, 1 lemari pakaian dari kaca, 1 lemari pakaian dari kayu, 1 mesin cuci, 1 lemari es/kulkas, 1 televisi audio, 1 tempat tidur terbuat dari kayu, 1 tempat tidur spring bed, 1 meja belajar, 1 buah sepeda pancal dan 11 layar dan server internet.

Perkara ini murni perkara harta bersama yang masih dikuasai oleh tergugat berada di wilayah Kabupaten Kediri akibat dari perceraian. Sehingga dalam perkara ini hanya perkara murni atau disebut juga an sich artinya “di dalam” atau “oleh dirinya sendiri” yaitu harta bersama. Dan kemudian mengajukan gugatan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Berdasarkan objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Kediri maka hakim

berdasarkan ketentuan sesuai pasal 118 ayat 3 HIR asas forum rei yang berbunyi objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (real property/immovabel property) maka gugatan harus diajukan di Pengadilan di tempat barang objek perkara terletak, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tergugat memberikan jawaban yang menjelaskan harta bersama berupa benda bergerak yaitu 1 unit mobil Daihatsu (Xenia) tahun 2013 sudah terjual dan uangnya di buat untuk melunasi angsuran kredit mobil tersebut.

Kemudian, terhadap harta asal penggugat yaitu sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah, bengkel dinamo, warnet, dan warung sate, tergugat mengakui bahwa harta tersebut milik penggugat.

Berdasarkan dari dalil gugatan penggugat, pengakuan tergugat dan keterangan para saksi baik dari penggugat maupun tergugat juga pemeriksaan setempat. Majelis Hakim menemukan hukum bahwa faktanya obyek sengketa yaitu 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2013, warna hitam metalik nomor polisi AG 615 YH, atas nama Srihartini di taksir senilai Rp.110.000.000,- sudah tidak ada karena telah di jual seharga Rp. 109.500.000,- kemudian oleh tergugat di buat melunasi sisa angsuran di PT. OTTO, dan sisa uang dari penjualan mobil kredit tersebut juga telah habis di gunakan untuk kepentingan bersama penggugat dan tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan yaitu mobil daihatsu xenia. Sehingga dalam pokok perkaranya harus di hapus dalam posita penggugat karena tidak terbukti keberadaannya.

Terhadap dalil gugatan tentang harta asal penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya dan dupliknya pada pokoknya mengakui atau membenarkan dengan kualifikasi atau syarat di dalam harta asal tersebut ada hak-hak tergugat. Maka dengan bersandar pada pasal 174 HIR Majelis Hakim menetapkan bahwa benda tetap berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah induk dan sebuah bangunan garasi mobil bangunan toko yang terdiri dari : bengkel dinamo, warnet dan warung sate.

Tergugat memberikan jawaban, juga menyertakan gugatan balik atau reconvensi dimana masih ada hak-hak tergugat yang masih belum terbayarkan. Dalam hukum acara bahwa gugat balik atau gugat reconvensi diatur dalam pasal 132 a dan pasal 132 b HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Yang dimaksud dengan gugatan reconvensi atau balik yakni untuk menggugat kembali penggugat konvensi, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan mengajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. (RIB HIR

(Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) Beserta Penjelasan, 2015)

Tujuan dari gugatan reconvensi atau balasan yakni menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan, mempermudah prosedur, menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, menetralsir tuntutan konvensi, acara pembuktian dapat di sederhanakan, menghemat biaya. (Primastuti, 2016). Sudah jelas bahwa dalam mengajukan gugatan reconvensi diatur dalam Undang-Undang yakni pasal 132 HIR, sehingga masyarakat yang awam hukum khususnya bagi seorang istri yang menginginkan hak-haknya bisa menuntut kembali dalam gugatannya.

Hakim menyatakan bahwa gugatan reconvensi yang diajukan pengugat reconvensi yaitu menuntut tergugat reconvensi memberikan nafkah anaknya dan biaya sekolah sampai menikah tersebut obscur libel atau kabur.

Suatu gugatan dikatakan obscur libel yaitu karena tidak memenuhi syarat-syarat formilnya. Menurut M. Yahya Harahap dalam I Nyoman Setiadi Sabda (2015, hal. 75) menjelaskan bahwa gugatan reconvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan antara lain menyebutkan dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat reconvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijteljkegrond) yang melandasi gugatan, menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

Menurut Ach. Zayyadi (2016) gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas yang mengakibatkan gugat cacat formil atau tidak sah, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat, tidak jelas objek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, petitum tidak terinci tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan reconvensi ini yaitu penggugat menuntut tergugat memberikan nafkah anaknya dan biaya sekolah sampai menikah seandainya anak ikut mantan istri. Hal ini hakim berpedoman dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 687 K/AG/2014, tanggal 30 Desember 2014, yang menyatakan “....karena menggabungkan perkara antara gugatan nafkah dengan harta bersama yang diatur dalam undang-undang adalah kumulasi antara permohonan cerai dengan nafkah mut’ah dan harta bersama, sehingga kumulasi nafkah dengan harta bersama tidak berdasar, sehingga perkara a quo obscur libel”. Hakim memutus gugatan reconvensi ini berpedoman dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum. Dimana dalam perkara ini tidak jelas atau kabur di dalam peraturan perundang-undangan

sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai perkara ini. Kemudian hakim memutus gugatan tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terdahulu sebagai acuan atau pedoman hakim memutus perkara harta bersama ini terkait gugatan rekonsvansi yang digabungkan perkara nafkah anak karena perkara yang ditangani mempunyai kesamaan.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonsvansi Dalam Perkara Harta Bersama No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr

Pada setiap memutus suatu perkara di persidangan, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukumnya untuk menciptakan rasa keadilan bersama serta di dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum. Hakim berwenang menentukan hukum mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan pihak yang berperkara.

Pada perkara No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr., tentang harta bersama hakim menyatakan gugatan rekonsvansi yang diajukan penggugat rekonsvansi tersebut obscur libel atau kabur dan hakim mempunyai alasan serta pertimbangannya memutus gugatan rekonsvansi tersebut obscur libel dalam perkara harta bersama ini. Obscur libel atau kabur yaitu gugatan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil atau tidak sah (Zayyadi, 2016).

Pada perkara No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr., tentang harta bersama hakim berkesimpulan gugatan rekonsvansi tersebut obscur libel dikarenakan hakim berpendapat bahwa penggugat rekonsvansi menggabungkan perkara yang tidak dibenarkan yaitu dengan nafkah anak. Walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu pasal 86 ayat (1) dijelaskan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

Bunyi pasal ini juga secara tegas membolehkan adanya kumulasi gugat bagi istri yang mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Pada pasal 86 ayat (1) yang membolehkan istri mengajukan kumulasi gugat atas beberapa tuntutan. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan itu memang merupakan hak penggugat sehingga isteri mengajukan gugatan kepada suami. Penguasaan anak yang belum mumayyiz (hadlanah) merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada isteri selaku ibunya, sehingga dengan hak hadlanah yang dimilikinya itu isteri berhak pula mengajukan gugatan nafkah anak.

Bunyi peraturan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dalam pasal 86 ayat (1) peneliti dapat menyimpulkan bahwa di dalam perkara perceraian bisa dikumulasikan dengan berbagai perkara seperti nafkah anak, nafkah istri, harta bersama. Apabila dalam perkaranya perceraian saja, maka perkara yang lain seperti harta bersama dan nafkah anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga setelah perceraian diputus, maka perkara seperti harta bersama, nafkah anak, nafkah istri itu berdiri sendiri ketika diajukan di Pengadilan.

Sengketa harta bersama ini tidak boleh dikumulasikan dengan perkara yang lain seperti nafkah anak karena penggabungan ini tidak dibenarkan. Menurut hakim yang memutus perkara No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr., bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan tidak sesuai syarat formil gugatan sehingga hakim memutus gugatan rekonsvansinya itu tidak dapat diterima karena obscur libel yang mana kedua perkara itu tidak bisa dikumulasikan sebab masing-masing perkara tersebut berdiri sendiri setelah perceraian yaitu harta bersama dan nafkah anak.

Hakim menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsvansi yang berisi penggugat menuntut tergugat memberikan nafkah anaknya dan biaya sekolah sampai menikah seandainya anak ikut tergugat. Bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim perlu merujuk dan selanjutnya mengambil alih pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 687 K/AG/2014, tanggal 30 Desember 2014, yang abstraksi hukumnya menyatakan "...karena menggabungkan perkara antara gugatan nafkah dengan harta bersama yang diatur dalam undang-undang adalah kumulasi antara permohonan cerai dengan nafkah mut'ah dan harta bersama, sehingga kumulasi nafkah dengan harta bersama tidak berdasar, sehingga perkara a quo obscur libel"; Hakim memutus gugatan rekonsvansi yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan penggabungan yang tidak dibenarkan karena masing-masing perkara ini yaitu harta bersama dan nafkah anak berdiri sendiri setelah perceraian diputus.

Menurut Ach. Zayyadi (2016, hal. 201-208) suatu gugatan tidak dapat diterima apabila ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum Artinya gugatan yang diajukan harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya.
2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No. 194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang

mempunyai hubungan hukum. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka gugatan tidak diterima.

3. Gugatan kabur (obscure libel) Gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas yang mengakibatkan gugat cacat formil atau tidak sah.
4. Gugatan masih prematur adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi.
5. Gugatan nebid in idem Adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya.
6. Gugatan error in persona Gugatan dianggap error in persona apabila diskualifikasi in persona, gemis aanhoedanig, plurium litis consortium.
7. Rei judicata deductae Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan.
8. Apa yang digugat telah dikesampingkan Dalam hal ini terdapat faktor set aside, yaitu apa yang digugat sudah terpenuhi, sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat, sudah melepaskan diri.
9. Gugatan telah lampau waktu Asalah gugatan yang diajukan telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang.
10. Pengadilan tidak bewenang mengadili Suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu.

Suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil gugatan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga gugatan tersebut cacat formil. Menurut M. Yahya Harahap dalam I Nyoman Setiadi Sabda (2015, hal. 75) menjelaskan bahwa gugatan rekonsensi mesti memenuhi syarat formil gugatan antara lain menyebutkan dengan tegas subjektif yang di tarik sebagai tergugat rekonsensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijteljkegrond) yang melandasi gugatan, menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Keterangan di atas bahwa sebuah gugatan harus memenuhi syarat-syarat formilnya, jadi apabila tidak terpenuhi syarat-syarat formilnya maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan hakim bisa langsung memutus gugatan rekonsensi tersebut tanpa diperiksa kembali, sehingga dalam gugatannya kabur atau obscure libel.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonsensi pada perkara No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr., yang termasuk perkara murni harta bersama tersebut adalah obscure libel karena gugatan rekonsensinya dikumulasikan dengan nafkah anak dan biaya sekolah sampai anak menikah sehingga gugatan rekonsensinya dinyatakan obscure libel atau kabur. Dapat disimpulkan bahwa hakim memutus gugatan rekonsensi ini berpedoman dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum. Dalam perkara ini tidak secara jelas atau kabur diatur di dalam peraturan undang-undangan sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai perkara ini. Kemudian hakim memutus gugatan rekonsensi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terdahulu sebagai acuan atau pedoman hakim memutus perkara harta bersama ini terkait gugatan rekonsensi yang digabungkan dengan perkara nafkah anak.
2. Berdasarkan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonsensi perkara No.1566/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr dalam sengketa harta bersama dapat disimpulkan bahwa hakim memutus gugatan rekonsensi berdasarkan yurisprudensi MA RI karena kesamaan perkara yaitu perkara harta bersama dikumulasikan dengan nafkah anak. Sehingga penggabungan tuntutan yang tidak dibenarkan menyebabkan gugatan yang diajukan obscure libel karena perkara tersebut berdiri sendiri sehingga hakim menyatakan gugatan rekonsensinya dinyatakan tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam *Intelektualita: Volume 06, Nomor 01*, 83-102.
- Gunawan, A. (2017). Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 Mei 2017*, 81-88.
- Helmi, M. (2014). Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonsensi Perkara Perceraian dengan Harta Bersama.

Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan
Volume 12 No. 22 Oktober, 1-12.

Jamal, R. (Tanpa Tahun). *Harta Bersama Akibat Perceraian dalam KHI dan UU NO. 1 Tahun 1974*.

Mesrain (2012). *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*. Ahkam: Vol. XII No.1 Januari, 59-70.

Primastuti, N. F. (2016, Juni 14). *Gugatan Rekonvensi*. Retrieved from <http://nurfitriaprimastuti.blogspot.com>.

RIB HIR (*Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*)
Beserta Penjelasannya. (2015). Pustaka Buana.

Rochaeti, E. (2013). *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari, 650-661.

Sabda, I. N. (2015). *Syarat Materil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata*. Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun, 70-77.

Saebani, B. A. (2013). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Zayyadi, A. (2016). *Materi Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*.